

Tinjauan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) Dengan Surat Teguran (ST) Dan Surat Paksa (SP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Kalibata

Oleh

Rachmat Aprilyanto

Abstrak

Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Kalibata digunakan untuk memperingatkan Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak. Surat Teguran dan Surat Paksa digunakan petugas pajak demi menyelamatkan penerimaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan tidak menyebabkan pajak berganda. Wajib Pajak di Indonesia menganut *self assesament system* yaitu Wajib Pajak diwajibkan menghitung, membayar, dan melaporkan utang pajak. Wajib Pajak Luar Negeri bisa mendirikan usaha di Indonesia dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT). Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan penagihan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tindakan penagihan diawali dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang jatuh tempo ataupun kurang dibayar. Penyitaan dan Lelang dapat dilakukan terhadap aset Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak sesuai perundangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa

***Review Of Value Added Tax (VAT) For Foreign Tax With Statement
Letter And Forced Letter InOffice Investment Service Tax Of
Foreign Four Kalibata***

By

Rachmat Aprilyanto

Abstract

Billing of Value Added Tax (VAT) with Warning Letter and Forced Letter made by Foreign Investment Tax Office Four Kalibata is used to alert Taxpayers to immediately pay off the tax debt. Warning Letter and Forced Letter used tax officer in order to save tax revenue. The Value Added Tax does not cause double taxation. Taxpayers in Indonesia adhere to the self assesament system that taxpayers are required to calculate, pay, and report the tax debt. Overseas Tax Payers may establish business in Indonesia in the Permanent Establishment (BUT). Tax Collection is a set of billing actions conducted in accordance with applicable law in Indonesia. Billing action begins with a tax bill (STP) that is due or underpaid. Foreclosures and Auctions may be made against the assets of the Taxpayer who does not pay off the tax debt under the prevailing laws in Indonesia.

Keywords: Tax Collection, Warning Letter, Forced Letter